

BAB III

DINAMIKA HUBUNGAN KEANGGOTAAN INGGRIS DALAM UNI EROPA

Dalam BAB III penulis akan membahas terkait dinamika hubungan keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa, pada bagian awal akan dijelaskan terkait kebijakan luar negeri Inggris terhadap Uni Eropa mulai dari perkembangan ekonomi Inggris, sistem pemerintahan dan sistem kepartaian Inggris. Pada bagian selanjutnya akan diuraikan mengenai sejarah integrasi Uni Eropa, diawali dengan sejarah awal keanggotaan Inggris di Uni Eropa kemudian akan dijelaskan juga mengenai dinamika hubungan Inggris dan Uni Eropa yang diawali dengan membahas referendum keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa hingga penolakan Inggris terhadap beberapa kebijakan perjanjian dalam Uni Eropa.

A. Kebijakan Luar Negeri Inggris terhadap Uni Eropa

Pada masa abad ke 15, Inggris merupakan salah satu kekuatan negara besar di seluruh wilayah dunia, kekuatan militer dan ekonominya mampu menguasai banyak wilayah, hal ini menyebabkan Inggris telah memberikan pengaruhnya di bidang budaya dan hukum yang cukup signifikan ke berbagai wilayah di dunia (Vlondoncity, 2014). Kita bisa melihat salah satu bahasa yang menguasai di dunia salah satunya adalah bahasa Inggris, ini adalah salah satu bukti pengaruh budaya Inggris terhadap peradaban dunia, selain itu Revolusi Industri yang terjadi antara periode tahun 1750-1850 dimana terjadinya perubahan di sektor pertanian, pertambangan, transportasi

dan teknologi, menjadikan Inggris sebagai negara yang unggul di bidang industri dan di susul oleh negara-negara lain di wilayah Eropa.

Pada masa era Revolusi Industri, terjadi gelombang urbanisasi yang tinggi di wilayah Inggris, banyak masyarakat pedesaan yang pindah ke wilayah perkotaan seperti London, Manchester, Liverpool dan Birmingham, hal ini dikarenakan banyak masyarakat pedesaan yang pindah untuk mencari pekerjaan di pabrik-pabrik yang ada di kota-kota tersebut. Hadirnya kawasan industri dan kemajuan yang sangat pesat di bidang industri ini sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan di Inggris, membuat perekonomian Inggris terus berkembang dan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Bahkan Inggris mampu mempertahankan kestabilan pemerintahannya pada saat terjadinya Revolusi Prancis pada tahun 1789-1799.

Pengaruh Inggris terhadap kawasan Eropa berawal dari perkembangan yang dialami oleh Kekaisaran Inggris yang berdiri sejak tahun 1897, dalam sejarah peradaban dunia Kekaisaran Inggris merupakan salah satu kekaisaran terbesar di dunia dan memiliki kekuatan yang menjadikan Inggris sebagai salah satu kekuatan utama dunia. Kekaisaran Inggris memiliki keunggulan di bidang maritim, oleh karenanya Kekaisaran Inggris pada masa penjajahan terus mengekspansi kekuasaannya di seluruh dunia, bahkan Kekaisaran Inggris sempat menguasai seperempat wilayah yang ada di dunia (Ferguson, 2004). Keberhasilan Inggris dalam memperluas kekuasaannya inilah yang menjadikan Inggris sebagai salah satu negara yang berpengaruh terhadap peradaban dunia.

Motif ekonomi dan politik merupakan salah satu faktor yang paling kuat mendorong Inggris untuk bergabung dalam Uni Eropa, bukan hal mudah bagi Inggris untuk berusaha bergabung bersama Uni Eropa yang pada waktu itu masih bernama Masyarakat Ekonomi Eropa, perjalanan Inggris bergabung dengan Uni Eropa mengalami penolakan selama beberapa kali oleh salah satu founder dari integrasi Uni Eropa yaitu Prancis yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Charles De Gaulle. Inggris baru resmi bergabung bersama Uni Eropa pada tahun 1973, untuk meyakinkan negara-negara pendiri Uni Eropa Inggris harus bekerja keras, hal ini dikarenakan Inggris dinilai belum siap untuk bergabung dengan Uni Eropa karena akan ada banyak proses adaptasi yang dilakukan oleh Inggris apabila bergabung dengan Uni Eropa.

Selama keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa kebijakan yang dibuat oleh Inggris juga tidak selamanya sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Uni Eropa, akibatnya Inggris sering dinilai sebagai salah satu negara pembangkang dalam keanggotaan Uni Eropa, penolakan Inggris terhadap kebijakan Uni Eropa diawali ketika Inggris menolak untuk menggunakan mata uang tunggal atau *eurozone*, Inggris memiliki alasan tersendiri yang lebih memilih menggunakan mata uang negaranya yaitu poundsterling, selain itu ketika Yunani mengalami krisis pada tahun 2008 Inggris juga menolak untuk *membail out* krisis Yunani, dalam prinsip integrasi Uni Eropa apabila ada salah satu negara mengalami krisis maka negara lainnya diharuskan untuk memberikan bantuan. Inggris tetap menolak memberikan bantuan

terhadap krisis Yunani karena Inggris beranggapan tidak memiliki kewajiban untuk membantu karena bukan bagian dari *eurozone*, selain itu Inggris juga tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomi apabila memberikan bantuan kepada Yunani, ini merupakan keputusan rasional bagi Inggris (Mingsta, 2003). Kebijakan luar negeri Inggris sering tidak sejalan dengan Uni Eropa, bahkan penolakan masyarakat Inggris terhadap Uni Eropa semakin kuat dengan adanya gerakan *Brexit* yang semakin kuat, dimana dalam referendum 2016 pada akhirnya Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa.

B. Kondisi Perpolitikan dan Ekonomi di Inggris

Untuk lebih memahami dinamika Inggris secara utuh, maka kita perlu memahami kondisi perpolitikan yang ada di negara tersebut, Inggris merupakan salah satu negara yang cukup kompleks sistem pemerintahannya, bahkan Inggris juga disebut sebagai induk dari parlemen, hal ini dikarenakan sistem parlemen secara efektif pertama kali berhasil diterapkan oleh negara Inggris.

1. Sistem Pemerintahan Inggris

Untuk memahami negara Inggris lebih dalam lagi maka salah satu aspek penting yang harus kita pahami adalah sistem pemerintahan yang ada di negara tersebut, dengan memahami sistem pemerintahan yang ada di Inggris maka kita akan mengetahui bagaimana proses pengambilan kebijakan yang ada di Inggris, selain itu kita juga memahami lembaga-lembaga pemerintahan yang sangat berpengaruh di Inggris. Sistem pemerintahan memiliki arti yang berasal dari dua substansi penting

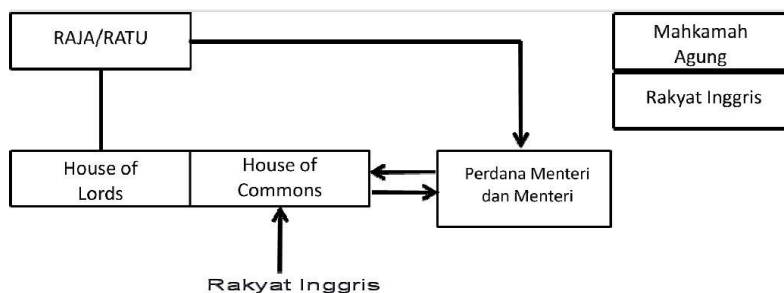
yaitu sistem dan pemerintahan, sistem memiliki arti sebagai suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional terhadap keseluruhan, sehingga menimbulkan ketergantungan antar bagian (Kusnardi, 1998). Sedangkan pemerintahan dapat diartikan sebagai urusan-urusan yang dilakukan oleh suatu negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat atau warganya serta menjalankan dan menjalankan tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif (Kusnardi, 1998). Berdasarkan dua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan pengertian dari sistem pemerintahan menurut Hamid S. Attamimi sebagai bagian-bagian dari pemerintahan, masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sendiri namun secara keseluruhan tiap bagian harus bekerjasama untuk terwujudnya tujuan negara yang telah direncanakan.

Bentuk pemerintahan Inggris adalah Monarki Konstitusional, dengan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan menteri-mentri sedangkan raja atau ratu hanyalah sebagai simbol kedaulatan negara saja. Menteri-mentri yang ada dalam kabinet berasal dari parlemen sekaligus yang akan bertanggungjawab terhadap parlemen, Inggris menganut sistem pemerintahan parlementer artinya peran parlemen dalam pemerintahan Inggris sangatlah kuat, Inggris juga disebut sebagai *The Mother Of Parliament* karena keberhasilan menerapkan sistem parlemen pertama kali yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri berhak memilih menteri-mentri yang kemudian masuk kedalam kabinet, selanjutnya kabinet menyusun kebijakan yang nantinya akan diajukan kepada parlemen sebagai rancangan peraturan, para menteri juga harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebijakan

yang dibuat kabinet terhadap parlemen. Dalam jalannya pemerintahan Perdana Menteri dan kabinet merupakan simbol utama dari pemerintahan.

Kekuasaan legislasi dalam sistem ketatanegaraan Inggris dipegang oleh parlemen yang terdiri dari dua kamar (bikameral) yaitu *House Of Commons* dan *House Of Lords*, kedua badan ini memiliki kedudukan yang terpisah namun sama-sama terlibat dalam proses legislasi. *House Of Commons* adalah badan legislasi yang dipilih langsung oleh rakyat Inggris dari masing-masing partai yang mengusungnya sedangkan anggota *House Of Lords* adalah orang-orang yang dipilih oleh kerajaan Inggris atau orang-orang yang dianggap telah berjasa terhadap negara, perbedaan peran yang sangat menonjol dari kedua badan tersebut ialah *House Of Lords* tidak terlibat dalam pembahsan yang berkaitan dengan pajak dan keuangan, selain itu mereka tidak mewakili konstituen. Berikut skema sistem pemerintahan yang bekerja di Inggris :

Gambar 3.1 Skema Sistem Pemerintahan Inggris



Dalam skema pemerintahan diatas, peran Ratu memiliki hubungan khusus dengan Perdana Menteri, meskipun Ratu tidak memiliki peran dalam menjalankan

pemerintahannya namun Ratu berhak memberikan pendapatnya kepada Perdana Menteri dan dalam hal audiensi ada waktu khusus yang disediakan agar Ratu bisa menyampaikan pendapat dan pandangannya dalam urusan pemerintahan di Inggris.

2. Sistem Kepartaian Inggris

Sistem kepartaian juga sangat berpengaruh dalam proses bagaimana kebijakan di Inggris dapat diputuskan, meskipun partai politik bukan lembaga yang memiliki legitimasi untuk memutuskan suatu kebijakan, namun partai politik memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam menentukan suatu kebijakan yang ada dalam pemerintahan, hal ini dilakukan melalui representasi partai yang ada dalam lembaga-lembaga pemerintahan seperti parlemen dan eksekutif, dengan memahami sistem kepartaian di Inggris maka kita dapat memetakan kekuatan partai politik di Inggris yang memiliki pengaruh kuat dalam pembuatan kebijakan. Partai politik memiliki arti sebagai kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Dan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik untuk menjalankan programnya (Budiarjo, 2008).

Meskipun Inggris sebagai negara dengan bentuk kerajaan, namun Inggris juga menerapkan sistem demokrasi dalam proses pemerintahannya, salah satunya Inggris melaksanakan proses pemilihan dalam menentukan anggota parlemen dan Perdana Menteri, sistem politik yang ada di Inggris ini juga akan mempengaruhi bentuk sistem kepartaian yang ada di Inggris. Sistem kepartaian diartikan sebagai pola interaksi atau pola kompetisi terus menerus dan bersifat stabil yang selalu tampak

dalam setiap proses pemilu di tiap negara (McKay, 2005). Negara Inggris menganut sistem kepartaian dwi-partai artinya dalam setiap proses pemilihan ada dua partai yang selalu dominan dan menjadi poros kekuatan utama, di Inggris sendiri sejak tahun 1920an ada dua partai yang selalu mendominasi dalam setiap pemilihan yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif, kedua partai ini selalu bergantian dalam menguasai kursi pemerintahan dan parlemen Inggris. Partai kecil di Inggris sebenarnya cukup banyak seperti Partai UKIP, Partai Demokrat Liberal, Partai Nasional Inggris dan Partai Hijau, namun kekuatan mereka belum bisa menandingi kekuatan partai superior yang ada di Inggris. Partai pemenang dalam pemilu di Inggris berhak menentukan kabinetnya, namun partai-partai yang kalah dalam pemilu juga bisa berperan sebagai oposisi dengan membentuk kabinet tandingan dengan tujuan jika suatu saat kabinet runtuh, maka kabinet tandingan bisa mengambil alih peran pemerintahan di Inggris.

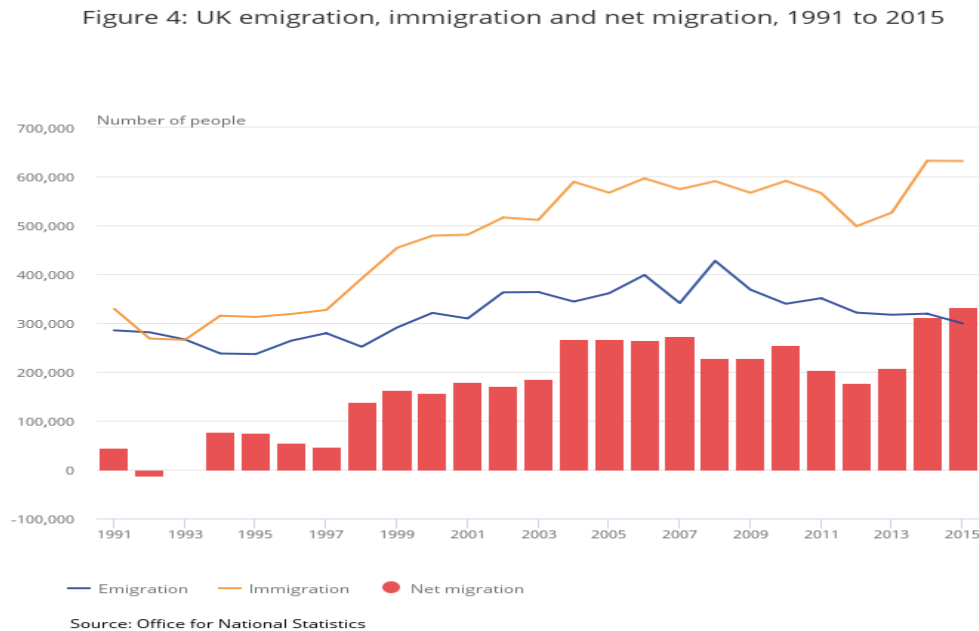
3. Permasalahan Imigrasi di Inggris

Inggris merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi di wilayah Eropa, dengan jumlah penduduk Inggris yang lebih dari 53 juta jiwa ini, setara dengan 84 persen total penduduk yang ada di Britania Raya sehingga Inggris menjadi kawasan dengan penduduk terpadat di Britania Raya. Menurut worldmeters populasi adalah jumlah penduduk secara keseluruhan (kedua gender dan semua umur) di suatu negara pada setiap tahunnya. Inggris menjadi kawasan dengan populasi terbanyak ke empat di Uni Eropa dan ke dua puluh lima di

dunia (United Nation, 2009). Kepadatan penduduk di wilayah Inggris mencapai 240 jiwa per kilometer persegi, terpadat ke dua di Uni Eropa setelah Malta. Penduduk asli di Inggris terdiri dari Bangsa Kalt yang berasal dari Skotlandia, Irlandia, dan Wales dan Bangsa Jerman yang berasal dari Anglo, Saxon, Norman dan Denmark. Sampai tahun 2015 Inggris merupakan salah satu wilayah yang menjadi tujuan para imigran di kawasan Eropa, tercatat sudah lebih dari 600.000 ribu imigran yang ada di Inggris dan mayoritas berasal dari wilayah konflik seperti Suriah pada tahun 2015, masalah imigran sudah menjadi perdebatan di kalangan politisi Inggris setiap tahunnya dan

memiliki potensi untuk terus bertambah meskipun muncul resistensi dari beberapa masyarakat Inggris, bagi masyarakat Inggris dengan banyaknya imigran yang masuk ke wilayah Inggris maka dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan sosial, Inggris merupakan salah satu negara tujuan bagi para imigran di kawasan Eropa, dengan banyaknya perindustrian yang beroperasi di Inggris merupakan salah satu daya tarik bagi para imigran, rata-rata para imigran di Inggris bekerja menjadi buruh di sektor industri yang ada di Inggris, berikut statistika angka imigrasi di Inggris sampai tahun 2015 :

Gambar 3.2 Grafik Jumlah Imigrasi di Inggris



Angka harapan hidup di Inggris termasuk yang tertinggi di dunia, angka harapan hidup memiliki arti penting karena menunjukkan seberapa lama jumlah kelahiran baru pada setiap tahunnya akan hidup. Angka harapan hidup di Inggris baik laki-laki dan perempuan yaitu 80,1 tahun, angka ini menunjukkan di atas rata-rata dari angka harapan hidup global yang menurut Divisi Populasi Departemen Ekonomi Persyarikatan Bangsa-Bangsa hanya pada angka 71 tahun, dengan rincian harapan hidup laki-laki saat lahir 78 tahun dan perempuan 82 tahun.

C. Perekonomian Inggris

Inggris merupakan salah satu negara yang secara ekonomi sangat kuat di wilayah Eropa, bahkan Inggris dengan kekuatan mata uang *poundsterlingnya* mampu

menjadi mata uang dengan nilai tertinggi di Eropa mengalahkan mata uang tunggal Eropa yaitu *euro*. Banyak terdapat aktivitas perekonomian global yang ada di Inggris, bahkan pada tahun 2009 London menjadi pusat keuangan terbesar Eropa dan dinobatkan sebagai pusat bisnis dan keuangan terbesar di dunia.

Perkembangan ekonomi Inggris dimulai pada saat terjadinya Revolusi Industri di Inggris, dimana pada saat itu awal mula kemajuan teknologi di Inggris terus berkembang dengan pesat, kemajuan teknologi salah satunya di bidang industri yang menyebabkan terus bertambahnya pabrik-pabrik di wilayah Inggris dan semakin kuatnya ambisi para pemilik modal untuk terus memperkaya dirinya dengan cara mengeksploitasi sumber daya yang ada di Inggris. Karena Revolusi Industri ini menjadikan Inggris sebagai negara kapitalis yang terus meningkatkan pendapatan kapitalnya, sistem ekonomi kapitalis sendiri memiliki arti dimana seluruh kegiatan ekonominya mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, sistem ini memberikan kebebasan bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan ekonominya agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Namun pada saat ini Inggris telah menganut sistem ekonomi campuran, artinya Inggris menerapkan sebagian besar prinsip-prinsip yang ada dalam pasar bebas, akan tetapi Inggris juga tetap mempertimbangkan aspek infrastruktur kesejahteraan sosialnya (Field, 2011).

Setelah Inggris berhasil meningkatkan perekonominya melalui sektor industri tambang dan manufaktur, sejak tahun 1970an Inggris juga mampu meningkatkan

perekonomiannya melalui sektor industri jasa seperti di bidang perbankan, asuransi dan moneter (Reitan, 2003, hal. 50). Setiap tahunnya indeks aktivitas di bidang industri jasa ini terus meningkat, bahkan pada tahun 2013 kenaikan indeks sangatlah pesat, menurut data yang di ambil dari *Markit Economics dan Chartered Institute of Purchasing and Supply* menunjukkan kenaikan angka dari 56,9 menjadi 60,2, padahal para pengamat ekonomi hanya memperkirakan kenaikan hanya akan menyentuh angka 57, 4 saja. Perkembangan pesat di bidang industri jasa ini merupakan momentum tepat bagi Inggris untuk terus meningkatkan kekuatannya melalui sektor-sektor lain selain industri manufaktur dan tambang, bahkan Inggris berpeluang untuk meningkatkan perekonomiannya melalui sektor pariwisata dimana Inggris memiliki kekuatan daya tarik melalui tempat-tempat yang bersejarah untuk mengundang wisatawan mancanegara.

Berkat keberhasilan Inggris dalam meningkatkan perekonomiannya melalui berbagai sektor salah satunya sektor industri, hal ini menjadikan Inggris sebagai salah satu kekuatan perekonomian yang kuat di dunia. *Produk Domestic Bruto (PDB)* Inggris menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Eropa bahkan PDB per kapita Inggris pada tahun 2016 sudah menyentuh angka rata-rata 41.603 poundsterling, angka ini merupakan yang tertinggi di Eropa. Selain itu PDB dari sektor industri jasa menjadi kekuatan terbesar Inggris dengan rata-rata sebanyak 337. 630 poundsterling (Trading Economics, 2016). PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu

metode untuk menghitung pendapatan nasional. Pasca Krisis ekonomi global tahun 2008 perekonomian Inggris mengalami kenaikan bahkan sejak tahun 2010 sampai saat ini PDB per kapita Inggris mengalami kenaikan yang konsisten berawal dari angka 38.709 poundsterling pada tahun 2010 sampai mencapai angka 41.603 poundsterling pada tahun 2016, sebagaimana di gambarkan dalam grafik PDB per kapita Inggris mulai tahun 2007 sampai 2016 sebagai berikut :

Gambar 3.3 Grafik PDB Per Kapita Negara Inggris Tahun 2016



Sumber : Tradingeconomics.com, UK PDB Growth Rate, Published Juli 2017

D. Dinamika Hubungan Inggris dan Uni Eropa

Proses bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa memerlukan waktu yang cukup lama, banyak pertimbangan diantara kedua belah pihak, bahkan Inggris sempat ditolak beberapa kali ketika mengajukan proposal untuk bergabung dengan Uni Eropa, hal ini menimbulkan banyak dinamika yang terjadi antara Inggris dan Uni Eropa.

1. Sejarah Intergrasi Eropa

Pasca perang dunia kedua merupakan awal dari munculnya gagasan dari beberapa kalangan di Eropa untuk mewujudkan Eropa yang lebih terintegrasi, karena sebelumnya kawasan tersebut merupakan wilayah perang yang melibatkan negara-negara di Eropa sehingga kawasan tersebut bukanlah tempat yang aman dan nyaman untuk kehidupan manusia, setelah berakhirnya perang dunia kedua muncul komitmen dari negara-negara tersebut untuk tidak menggunakan jalan peperangan lagi, sehingga salah satu cara untuk menghindari peperangan yaitu menciptakan integrasi di kawasan tersebut.

Awal mula integrasi Eropa yaitu dengan munculnya komunitas dari beberapa negara yang bekerjasama dalam sektor batubara dan baja dengan nama *European Coal and Steel Community* (ECSC), kesepakatan tersebut terjadi dalam Perjanjian Paris pada tahun 1951 yang anggotanya terdiri dari enam negara yaitu Belgia, Prancis, Italy, German, Luxemburg, dan Belanda. Intergrasi tersebut merupakan embrio dari berdirinya Uni Eropa, komunitas ini diharapkan mampu mengintegrasikan negara-negara demokratis di Eropa dan sebagai awal mula transformasi kawasan Eropa untuk menjadi kawasan modern. ECSC merupakan organisasi internasional dengan prinsip supranasionalisme pertama di Eropa, konsep supranasionalisme maksudnya adalah sejenis kesatuan politik multinasional dimana kekuasaan dinegosiasikan diserahkan ke otoritas oleh pemerintah negara-negara anggota (CVCE, 2013).

Pada tahun 1957 komunitas tersebut menandatangani Perjanjian Roma dan membentuk *European Economic Community* (EEC), dalam kesepakatan tersebut memberikan peluang kerjasama yang lebih luas lagi tidak hanya terbatas dalam sektor batubara dan baja, akan tetapi dengan tujuan mengintegrasikan ekonomi negara-negara anggota termasuk di dalamnya terkait pasar bersama, selain di sektor ekonomi dalam perjanjian tersebut juga dibentuk suatu lembaga untuk mengembangkan energi nuklir bagi negara anggota bernama *European Atomic Energy Community* (EURATOM) (Litle, 2007). Lembaga ini sama dengan ECSC yang hanya terbatas dalam sektor tertentu saja yaitu dalam hal pengembangan energi nuklir.

Kerjasama antar negara Eropa terus berkembang hingga pada akhirnya ketiga institusi yang sudah didirikan yaitu ECSC, EEC dan EURATOM resmi dileburkan menjadi satu institusi bernama *European Community* (EC) pada bulan Juli tahun 1967. Dengan semakin berkembangnya integrasi tersebut, maka memberikan daya tarik bagi negara Eropa lainnya untuk bergabung, pada tahun 1973 negara Denmark, Irlandia, dan Inggris memutuskan untuk bergabung dengan EC dan pada tahun-tahun berikutnya diikuti oleh negara lainnya seperti Yunani, Portugal dan Spanyol yang menyatakan bergabung dengan blok Eropa tersebut. Institusi tersebut akhirnya bertransformasi menjadi *European Union* (EU) atau pada saat ini dikenal dengan nama Uni Eropa pada tahun 1993, setelah negara-negara anggota menandatangani Perjanjian Maastrich di Belanda. Dalam Perjanjian Maastrich juga diterapkan beberapa prinsip dasar yang menjadi pondasi kerjasama Eropa yaitu *free*

movement of persons, free movement of goods, free movement of services, dan free movement of capital dengan tujuan utamanya agar bisa terwujudnya *single market* di kawasan Eropa (European Union, 1990).

Uni Eropa saat ini merupakan organisasi regional yang sangat maju dan menjadi percontohan bagi organisasi regional lainnya, keanggotaan Uni Eropa pada saat ini ialah 28 negara anggota, selain itu dari segi ekonomi kekuatan perekonomian negara-negara Uni Eropa juga sangat baik bahkan menurut United Nation Development Programme indeks pembangunan manusia negara anggota Uni Eropa sangatlah tinggi. Pada tahun 2016 Uni Eropa mampu menghasilkan PDB sekitar 16.500 triliun dollar AS atau sekitar 23 persen dari PDB global. Dengan adanya Uni Eropa juga memberikan keuntungan bagi masyarakat Eropa karena mereka bisa dengan mudah untuk mobilisasi ke negara-negara lain dan mencari pekerjaan di lain negara, tentunya ini dapat memberikan kemudahan akses pekerjaan bagi masyarakat Eropa.

2. Keanggotaan Inggris di Uni Eropa

Inggris bukanlah negara poros utama dalam sejarah berdirinya Uni Eropa, hal ini dikarenakan Inggris baru resmi bergabung dengan Uni Eropa atau pada saat masih menjadi EC pada tahun 1973, sehingga Inggris tidak terlibat dalam proses pembentukan cikal bakal organisasi Uni Eropa yang dulu berawal dari ECSC, disusul dengan berdirinya EEC dan EURATOM yang pada saat ini berkembang menjadi Uni Eropa. Jauh sebelum organisasi ini berdiri, sekitar abad ke 16 sampai 17 menjadi

awal berdirinya kolonial Inggris yang pada saat itu merupakan kekaisaran terbesar di dunia, hampir di seluruh daratan dunia ada wilayah atau negara yang menjadi bagian dari kolonial Inggris, ini merupakan bukti nyata bahwa waktu itu Inggris merupakan negara paling maju di wilayah Eropa dibandingkan negara-negara lainnya.

Pengaruh Inggris terhadap beberapa wilayah di dunia sampai abad ke 20 masih sangat kuat, banyak negara-negara bekas jajahan atau kolonial Inggris yang sudah merdeka tapi mereka tetap loyal terhadap kerajaan Inggris seperti Australia, Malaysia dan Hongkong, hal ini menjadikan pandangan bagi aktor-aktor politik di Inggris bahwa Inggris masih jauh lebih unggul dibandingkan negara-negara Eropa lainnya, ada kekhawatiran bagi beberapa kalangan dengan masuknya Inggris terhadap integrasi Eropa justru akan menghambat laju perkembangan Inggris (Luhulima, 1992). Banyak pertimbangan dan kekhawatiran yang menyebabkan Inggris tidak langsung memilih jalan untuk bergabung dengan integrasi Eropa pada waktu itu, seperti terkait pandangan Eropa yang akan menghambat laju perkembangan Inggris atau pandangan terkait Inggris masih ada di level yang lebih tinggi dari negara Eropa lainnya, sehingga ini tidak akan menguntungkan Inggris.

Proses bergabungnya Inggris dalam Uni Eropa juga tidak berjalan dengan mudah, Inggris harus ditolak sebanyak dua kali ketika akan mengajukan keanggotaan Uni Eropa, awal mula Inggris mengajukan proposal untuk bergabung pada tahun 1961 ketika kepemimpinan Partai Konservatif dengan PM Harold Macmillan, namun sayangnya pada tahun 1963 presiden Prancis saat itu Charles de Gaulle memveto

keinginan Inggris untuk bergabung, dikarenakan Presiden Prancis beranggapan Inggris memiliki kultur yang berbeda dengan anggota EEC pada waktu itu dan dikhawatirkan perbedaan ini akan berdampak pada negara anggota lainnya. Proposal pengajuan keanggotaan Inggris yang ke dua di ajukan pada tahun 1966, namun lagi-lagi presiden Prancis memberikan vetonya pada tahun 1967, Inggris baru resmi menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 1973, ketika itu Presiden De Gaulle sudah lengser sehingga tidak menghalangi jalan Inggris untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Dalam keanggotaan Inggris di Uni Eropa bukanlah tanpa dinamika, namun banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi dalam hubungan Inggris dan Uni Eropa, dalam hal ini tidak semua kebijakan yang di setuju oleh Uni Eropa di terapkan oleh negara Inggris, seperti halnya Inggris menolak untuk menandatangani perjanjian *The Maastricht* yang salah satu isinya yaitu mengharuskan negara-negara Eropa untuk menggunakan mata uang tunggal yaitu *euro*, meskipun Inggris sudah bergabung dengan Uni Eropa tapi Inggris mengajukan klausul untuk tidak menggunakan *euro* dan tetap menggunakan mata uang negaranya yaitu *pounsterling*, keputusan tersebut di ambil Inggris karena Inggris ingin menjadi penyeimbang di kawasan Eropa, mata uang *poundsterling* pada dasarnya sudah stabil di dunia internasional, namun apabila Inggris menggunakan *euro* di khawatirkan akan terkena efek domino apabila Eropa terkena krisis (Rendall, 2007). Selain itu Inggris juga tidak mau menandatangani perjanjian Schengen, isi perjanjian tersebut yaitu berupa penghapusan pengawasan perbatasan di antara negara-negara anggota, perjanjian ini

berisi terkait kebijakan bersama untuk izin masuk jangka pendek atau zona bebas perbatasan bagi masyarakat Eropa. Penolakan yang dilakukan Inggris terhadap beberapa kebijakan Uni Eropa menimbulkan hubungan Inggris dan Uni Eropa yang semakin tidak harmonis, disisi lain meskipun Inggris sudah menjadi anggota Uni Eropa tetapi Inggris tetap mengutamakan kepentingan nasionalnya sebagai prioritas dalam mengambil kebijakan.

3. Referendum Keanggotaan Inggris di Uni Eropa

Setelah Inggris bergabung dengan Uni Eropa dalam perjalananya banyak dari kalangan internal Inggris yang akhirnya meragukan keanggotaan Inggris di Uni Eropa, bahkan sejak Inggris bergabung pada tahun 1973 tidak lama setelah itu diadakan referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa pada tahun 1975, ketika itu Inggris dipimpin oleh Partai Buruh sedangkan ketika Inggris bergabung dengan Uni Eropa dipimpin oleh Partai Konservatif, referendum dilakukan karena ada waktu itu Partai Buruh beranggapan Uni Eropa tidak memberikan keuntungan bagi Inggris, akan tetapi Inggris justru mengeluarkan banyak biaya untuk EEC. Pada referendum 1975 banyak masyarakat Inggris yang masih menginginkan Inggris untuk bertahan di Uni Eropa dengan perolehan suara 67,2 persen, sehingga ketika itu Inggris tetap bertahan di Uni Eropa (Berita Satu, 2013).

Referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa akhirnya dilakukan yang kedua kalinya pada bulan Juni 2016, hal ini dilakukan setelah PM David Cameron dalam kampanyenya berjanji akan mengadakan referendum apabila dirinya terpilih

kembali menjadi Perdana Menteri Inggris dalam pemilihan umum tahun 2015, akhirnya David Cameron terpilih kembali dan melaksanakan janjinya pada tahun 2016. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia referendum adalah penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum oleh semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat. Referendum yang dilakukan oleh Inggris adalah salah satu upaya untuk menyelesaikan perdebatan antara kubu pro dan kontra brexit, pemerintah Inggris menyerahkan keputusan ini kepada masyarakat Inggris sehingga pemerintah mengadakan referendum. Karena rakyatlah yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara, maka rakyat dapat menentukan haknya melalui mekanisme referendum (Ivvardy, 2015). Hasil dari referendum Inggris ini sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah Inggris dalam menentukan keanggotaan Inggris di Uni Eropa.

Istilah yang sangat populer dalam referendum Inggris 2016 yaitu Brexit dan Bremain, Brexit adalah kata yang digunakan sebagai cara singkat untuk mengatakan Inggris meninggalkan Uni Eropa. Singkatan dari Britain dan Exit yang menjadi Brexit (Setiawati, 2016). Sedangkan Bremain adalah ungkapan untuk mengatakan agar Inggris tetap bergabung dalam Uni Eropa. Kedua istilah ini tidak terlepas dari perdebatan antara dua kubu, yaitu kubu yang menginginkan agar Inggris keluar dari Uni Eropa dan kubu yang menginginkan agar Inggris tetap bertahan dalam Uni Eropa. Karena polemik Brexit ini, telah mengakibatkan perpecahan di kalangan politisi dan partai politik di Inggris, ada kubu pro dan kontra terhadap Brexit, kubu

pro Brexit yang paling gencar mengkampanyekan adalah politisi dari Partai Konservatif dan mantan walikota London yaitu Boris Johnson, tokoh lainnya yaitu Nigel Farage, pemimpin partai UKIP, mereka berkampanye mengenai banyaknya imigran yang masuk ke Inggris mengakibatkan masalah baru di Inggris, oleh karena itu untuk mengurangi jumlah imigran maka Inggris harus keluar dari Uni Eropa. (Supriadi, 2016).

Referendum Brexit telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2016, hasil referendum ini dinilai sangat mengejutkan, karena dimenangkan oleh kubu yang menginginkan keluar dari Uni Eropa. Hasil perolehan suara kubu Pro Brexit adalah 51,9 persen sedangkan kubu kontra 48,1 persen, dengan perbandingan angka 17,410,742 memilih keluar Uni Eropa dan 16,141,241 bertahan. (Ismail, 2016).

